**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Abad ke-21 mengindikasikan tantangan berupa perubahan tatanan sosial yang menjurus pada penyatuan nilai dan norma kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Hal ini kemudian dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah globalisasi.

Arus globalisasi yang tidak dapat dikendalikan dengan baik maka akan mengancam nilai, norma dan budaya lokal. Termasuk juga akan menimbulkan pergeseran karakter sosial melalui penyelenggaraan pendidikan yang tidak menjunjung tinggi identitas bangsa.

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ditopang oleh tiga pilar yang dikenal dengan tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan merupakan jalur penyelenggaraan pendidikan melalui lembaga pendidikan formal (sekolah), nonformal (masyarakat) dan informal (keluarga) sebagaimana tercantum pada pasal 13 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu: “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.”[[1]](#footnote-2) Ketercapaian tujuan pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh efektivitas tiga pilar pendidikan ini.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 menjelaskan bahwa:

1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
2. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
3. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.[[2]](#footnote-3)

Penyelenggaraan jalur pendidikan formal diarahkan, dibimbing, dibantu serta diawasi secara langsung oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Adapun kewajiban pemerintah pusat serta pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana termaktub pada pasal 11 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”[[3]](#footnote-4)

Jalur pendidikan nonformal berfungsi mendukung berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat melalui transformasi pengetahuan *life skill.* Hal ini diharapkan mampu memberi nilai tambah bagi peserta didik sehingga dapat menunjang ketercapaian kehidupan yang berkualitas. Adapun kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional termaktub pada pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu: “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.”[[4]](#footnote-5)

Bentuk kegiatan pembelajaran pada jalur pendidikan informal dilaksanakan secara mandiri oleh orang tua dan anggota keluarga. Penanaman nilai dan norma kepada peserta didik merupakan substansi dari jalur pendidikan informal. Oleh karena itu, keteladanan orang tua selaku pemimpin dalam sebuah keluarga sangatlah dibutuhkan guna mendukung ketercapaian dari tujuan pendidikan pada jalur pendidikan ini. Hal tersebut merupakan perwujudan kewajiban orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana termaktub pada pasal 7 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu: “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.”[[5]](#footnote-6)

Efektivitas tripusat pendidikan tercermin pada lahirnya generasi yang tangguh secara kognitif, afektif dan psikomotorik. Namun, ketercapaian tujuan pendidikan nasional tersebut saat ini patut untuk dipertanyakan. Maraknya tindak penyimpangan sosial oleh oknum intelektual bangsa yang merupakan produk dari sistem pendidikan nasional mengisyaratkan adanya kesalahan dalam penyelenggaraan tripusat pendidikan.

Berbagai bentuk tindak penyimpangan sosial yang dilakukan oleh oknum intelektual bangsa diantaranya adalah perilaku korupsi yang semakin memprihatinkan di Indonesia. Berdasarkan survei indeks persepsi korupsi oleh *Political & Economic Risk Consultancy* (PERC) pada tahun 2011 mengukuhkan Indonesia sebagai negara terkorup dari 16 negara di kawasan Asia Pasifik.[[6]](#footnote-7) Kenyataan pahit ini semakin diperburuk dengan lemahnya sistem peradilan di negeri ini. Seperti halnya yang dikemukakan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang mengungkapkan bahwa dalam 10 tahun terakhir buronan kasus korupsi di Indonesia yang melarikan diri ke luar negeri berjumlah 45 orang dan hanya sedikit diantaranya yang dapat tertangkap oleh penegak hukum.[[7]](#footnote-8) Sementara itu, Wijayanto dan Ridwan Zachrie mengungkapkan data yang cukup mencengangkan terkait perilaku korupsi pada berbagai jenis profesi di Indonesia dalam kurun waktu 2001-2008:

Jika didasarkan pada profesi pelaku korupsi, maka sumber kerugian negara terbesar adalah korupsi yang dilakukan oleh swasta senilai 37,6 triliun rupiah (55,7 persen), kemudian disusul oleh pegawai BUMN/D sebesar 29,3 triliun rupiah. PNS dan anggota legislatif berturut-turut menempati urutan ketiga (455,1 miliar rupiah) dan keempat (192,5 miliar rupiah) ….[[8]](#footnote-9)

Selain kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia, tindak kekerasan dan pergaulan bebas di kalangan pelajar juga turut memperpanjang daftar problematika bangsa yang harus dituntaskan oleh pemerintah saat ini.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) pada Oktober 2010 hingga Januari 2011 menyimpulkan bahwa dari 100 sekolah menengah di Jakarta dan sekitarnya yang diteliti menunjukkan 48,9% pelajar mendukung cara kekerasan dalam menghadapi masalah moralitas dan konflik keagamaan.[[9]](#footnote-10) Sedangkan survei yang dilakukan oleh *Plan* Indonesia yang melibatkan 1.500 siswa SMA dan 75 guru di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan Bogor mengemukakan bahwa 67,9% siswa menganggap kekerasan terjadi di sekolah berupa kekerasan verbal, psikologis dan fisik. Sementara itu, 27,9% siswa mengaku turut melakukan tindak kekerasan dan 25,4% siswa mengambil sikap diam saat melihat terjadinya kekerasan.[[10]](#footnote-11)

Degradasi moral generasi penerus bangsa kian merosot. Sebagaimana hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan (LSCK) serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora (PUSBIH) yang mengemukakan bahwa 42,5% responden remaja di Kupang (Nusa Tenggara Timur) mengaku telah melakukan hubungan seks di luar nikah. Sedangkan 17% responden remaja di Palembang (Sumatera Selatan) dan Tasikmalaya (Jawa Barat) juga mengaku telah melakukan tindakan yang sama. Sementara itu, 9% responden remaja di Singkawang (Kalimantan Barat) juga mengaku telah melakukan pergaulan bebas. Sedangkan 6,7% responden remaja di Cirebon (Jawa Barat) juga termasuk penganut seks bebas. Kasus seks bebas di kota-kota besar lainnya, seperti di Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya menunjukkan persentase di atas 50%. Misalnya 97,05% responden remaja di Yogyakarta yang dikenal sebagai Kota Pelajar telah melakukan hubungan seks di luar nikah.[[11]](#footnote-12)

Berbagai kasus yang telah dikemukakan di atas hanyalah sekelumit dari banyaknya permasalahan yang melanda negeri ini. Permasalahan tersebut tentu memiliki kaitan yang sangat erat dengan sistem pendidikan di tanah air. Ali Ibrahim Akbar dalam Zainal Aqib dan Sujak mengindikasikan sumber permasalahan dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Praktik pendidikan di Indonesia cenderung lebih berorientasi pada pendidikan berbasis *hard skill* (keterampilan teknis) yang lebih bersifat mengembangkan *intelligence quotient* (IQ), namun kurang mengembangkan kemampuan *soft skill* yang tertuang dalam *emotional quotient* (EQ) dan *spiritual quotient* (SQ).[[12]](#footnote-13)

Kecerdasan kognitif yang tidak disertai dengan kecerdasan sosial akan menimbulkan disorientasi tujuan dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Daniel Goleman dalam Jamal Ma`mur Asmani menyatakan bahwa: “80% keberhasilan seseorang di masyarakat dipengaruhi oleh kecerdasan emosi, dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak (IQ).”[[13]](#footnote-14) Sedangkan, Sukidi mengemukakan bahwa *Intelligence Quotient* (*IQ*) atau kecerdasan intelektual dan *Emotional Quotient* (*EQ*) atau kecerdasan emosional tanpa dibarengi *Spiritual Quotient* (*SQ*) atau kecerdasan spiritual hanya akan melahirkan generasi yang memperturutkan hawa nafsu dan menjunjung tinggi materialisme sebagai filosofi hidupnya.[[14]](#footnote-15) Dengan demikian, tidaklah berguna segala medali dan penghargaan yang diperoleh siswa-siswi Indonesia di kancah nasional maupun internasional jika tidak dibarengi dengan prestasi gemilang pada aspek moralitas bangsa.

Orientasi output sistem pendidikan nasional yang hanya merujuk pada peningkatan kecerdasan intelektual peserta didik dan tidak dibingkai dengan peningkatan kecerdasan emosional serta kecerdasan spiritual menjadi akar permasalahan bangsa saat ini. Hal ini disebabkan oleh penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal tidak sejalan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi.

Surono, peneliti dari Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa jalur pendidikan formal telah gagal dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik. Hal ini disebabkan oleh banyaknya guru yang tidak mencerminkan keteladanan bagi para muridnya.[[15]](#footnote-16) Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Taufan, Ketua Forum Guru Independen Indonesia (FGII) Jawa Barat bahwa saat ini banyak guru yang tidak memiliki integritas. Krisis karakter tersebut berupa tidak berakhlak mulia, tidak jujur, tidak bertanggung jawab dan tidak disiplin.[[16]](#footnote-17)

Pamela Nilan mengemukakan hasil penelitiannya yang dilaksanakan di Surakarta, Jakarta, Pekanbaru, Mataram dan Makassar bahwasanya ketidakharmonisan kehidupan masyarakat dilatarbelakangi oleh kondisi emosi yang tidak stabil dan tidak terkontrol.[[17]](#footnote-18) Kondisi masyarakat yang labil ini tentu saja akan menghambat ketercapaian tujuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal. Sedangkan, Ahmad Syafii Ma`arif mensinyalir penyebab gagalnya penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan informal adalah banyaknya orang tua yang tidak menyadari perannya sebagai suri teladan bagi anak-anaknya.[[18]](#footnote-19) Guna mengatasi berbagai problematika tersebut, maka dibutuhkan sebuah solusi radikal dan inovatif guna mengatasi rapuhnya tiga pilar pendidikan nasional.

Rekonstruksi tripusat pendidikan menjadi sebuah keharusan jika kita ingin membenahi keterpurukan sistem pendidikan nasional. Revitalisasi jalur pendidikan formal, nonformal dan informal merupakan kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan karakter dalam rangka pembinaan moralitas bangsa.

Secara terminologis, pendidikan karakter merupakan upaya peningkatan kualitas peserta didik pada seluruh domain pendidikan yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Hal ini senada dengan pengertian pendidikan karakter menurut Zainal Aqib dan Sujak yang mengemukakan bahwa: “Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut.”[[19]](#footnote-20)

T. Ramli dalam Zainal Aqib dan Sujak mengemukakan bahwa pendidikan karakter berintegrasi dengan pendidikan akhlak yang bersumber dari nilai-nilai ke-Tuhanan.[[20]](#footnote-21) Sementara itu, Jamal Ma`mur Asmani menyatakan bahwa pendidikan karakter tidak hanya mengasah kecerdasan intelektual, melainkan juga meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual.[[21]](#footnote-22) Produk yang dihasilkan oleh pendidikan karakter adalah manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku luhur dan berilmu. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[[22]](#footnote-23)

Pendidikan karakter haruslah dimulai dari keluarga yang merupakan satuan masyarakat terkecil. Orang tua (ayah dan ibu) sebagai pemimpin dan suri teladan dalam keluarga dituntut untuk dapat menginternalisasikan nilai moralitas dan ke-Tuhanan dalam kepribadiannya. Hal ini bertujuan agar mereka tidak hanya mampu memberi contoh namun juga mampu menjadi contoh bagi anak-anaknya.

Orang tua memiliki peran yang sangat strategis dalam pembinaan anggota keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dengan terbentuknya sebuah keluarga yang berkualitas akan mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis. Hal ini merupakan modal dasar bagi bangsa Indonesia dalam pembenahan sistem pendidikan nasional.

Setelah lebih dari setengah abad proklamasi kemerdekaan Indonesia, kehidupan masyarakat di negeri bahari ini semakin maju dan majemuk. Tidak hanya suku, agama dan ras yang beraneka ragam, kemajemukan kultur juga merambah pada sendi porpolitikan bangsa ini.

Walau sempat mengalami pemangkasan jumlah partai politik pada pemerintahan orde baru, kini masyarakat diberikan kebebasan yang lebih luas dalam menyuarakan pendapat dan berhimpun di zaman reformasi. Hal ini kemudian ditandai dengan semakin menjamurnya partai politik dan organisasi kemasyarakatan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu dari sekian banyaknya partai politik di Indonesia yang lahir sejak digulingkannya kepemimpinan presiden Soeharto pada tahun 1998. Partai Islamis ini menduduki urutan ke empat perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum 2009 silam.[[23]](#footnote-24) Hal tersebut menandakan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai berlambang bulan sabit dan untaian padi ini. Salah satu kunci keberhasilan PKS sampai dengan saat ini adalah sistem pengkaderan yang solid dan berkelanjutan.

PKS selalu menitikberatkan pada pembinaan kepribadian setiap kader dan simpatisannya. Hal ini beranjak dari kesadaran PKS dalam melihat kekeringan moralitas dan spiritualitas bangsa Indonesia yang merupakan akar dari segala permasalahan di negeri ini. Mekanisme pembinaan kader dan simpatisan partai berpedoman pada *Manhaj Tarbiyah* PKS*.* M. Imdadun Rahmat menyatakan bahwa wujud *tarbiyah* PKS dalam pembinaan kader dan simpatisannya diantaranya melalui kegiatan *halaqah*.[[24]](#footnote-25)

*Halaqah* atau *liqo`* adalah model pembelajaran Nabi Muhammad SAW dalam mendidik para sahabatnya. Muhammad Syafii Antonio menyatakan bahwa: “Rasulullah SAW mengajar dan memberi *khutbah* dalam bentuk *halaqah* di mana para sahabat duduk mengelilingi beliau untuk mendengar dan melakukan tanya-jawab berkaitan dengan urusan agama dan kehidupan sehari-hari.”[[25]](#footnote-26)

Jauh sebelum FW. Foerster memperkenalkan konsep pendidikan karakter pada akhir abad ke-18, Rasulullah SAW telah menerapkan konsep tersebut dalam pembinaan para sahabatnya sejak lebih dari 14 abad silam. *Halaqah* merupakan model pembelajaran dengan menerapkan kurikulum pendidikan karakter berbasis persuasif. Nakoesteen sebagaimana dikutip oleh Hasan Asari dalam Abuddin Nata menyatakan bahwa konsep pendidikan profetik ini tidak hanya menyentuh ranah intelektual peserta didik, melainkan juga ranah emosional dan spiritual yang merupakan landasan utama pendidikan karakter.[[26]](#footnote-27)

Setiap peserta *halaqah* secara berkelompok berupaya meningkatkan kecerdasan spiritualnya yang kemudian akan menjadi pengungkit lahirnya kecerdasan emosional dan intelektual. Terkait hal ini, Danah Zohar dan Ian Marshall dalam Sukidi menjelaskan keutamaan *Spritual Quotion* (*SQ*) dibandingkan *Intelegence Quotion* (*IQ*) dan *Emotional Quotion* (*EQ*) sebagai berikut: “*SQ is the necessary foundation for the effective functioning of both IQ and EQ. It is our ultimate intelligence.”*[[27]](#footnote-28)Kecerdasan spiritual merupakan hal mendasar guna memfungsikan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional secara efektif. Danah Zohar dan Ian Marshall juga menegaskan bahwa kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan tertinggi manusia.

Salah satu basis pengkaderan PKS di Provinsi Sulawesi Tenggara berlokasi di Kelurahan Ranomeeto. Daerah ini terletak di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan. Mata pencaharian masyarakatnya yakni bertani, berdagang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Daerah ini juga terdiri dari beragam suku dan agama.

Andi Mansyur, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa wujud pembinaan kader dan simpatisan PKS di Kelurahan Ranomeeto antara lain melalui kegiatan *halaqah*. Kader dan simpatisan PKS di daerah ini secara rutin mengikuti *halaqah* yang dilaksanakan setiap pekan secara bergilir di rumah peserta *halaqah*. Umumnya, kader dan simpatisan PKS di kelurahan ini terdiri dari anggota masyarakat yang telah berkeluarga. Selain itu, kader dan simpatisan PKS juga terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat setempat.[[28]](#footnote-29)

Pendidikan karakter melalui kegiatan *halaqah* merupakan upaya pengembangan karakter peserta didik dengan menggunakan pendekatan profetik. *Character building* melalui model pembelajaran *halaqah* menjanjikan sebuah harapan penyelenggaraan pendidikan bangsa yang lebih baik. Internalisasi nilai moralitas dan ke-Tuhanan yang tercermin dari karakter peserta didik merupakan solusi dalam pengentasan berbagai problematika bangsa yang besar ini.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis membatasi dan merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan *halaqah* pada pembinaan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan?
2. Apa nilai-nilai karakter yang terintegrasi dalam kegiatan *halaqah* pada pembinaan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan?
3. Bagaimana hasil dari pendidikan karakter melalui kegiatan *halaqah* pada pembinaan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan?
4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan *halaqah* pada pembinaan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai karakter yang terintegrasi dalam kegiatan *halaqah* pada pembinaan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan.
3. Untuk mengetahui hasil dari pendidikan karakter melalui kegiatan *halaqah* pada pembinaan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan.
4. **Manfaat Penelitian**
5. **Manfaat praktis**
6. Mengetahui proses pelaksanaan kegiatan *halaqah* pada pembinaan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan dapat bermanfaat dalam pengembangan strategi pembelajaran pada jalur pendidikan formal.
7. Mengetahui nilai-nilai karakter yang terintegrasi dalam kegiatan *halaqah* pada pembinaan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan dapat bermanfaat dalam pengembangan pendekatan pembelajaran dalam rangka internalisasi nilai-nilai karakter pada jalur pendidikan formal.
8. Mengetahui hasil dari pendidikan karakter melalui kegiatan *halaqah* pada pembinaan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan dapat bermanfaat dalam perumusan model pembelajaran yang efektif dalam rangka pelaksanaan pendidikan karakter pada jalur pendidikan formal.
9. **Manfaat teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pendidikan terutama pada aspek model, strategi dan pendekatan pembelajaran.

1. **Definisi Operasional**

Definisi operasional terkait judul penelitian ini adalah:

1. Pendidikan karakter adalah upaya transformasi ilmu pengetahuan dalam rangka membentuk nilai-nilai karakter pada diri peserta didik yang bersumber dari peningkatan kecerdasan spiritual (*SQ*), kecerdasan emosional (*EQ*) dan kecerdasan intelektual (*IQ*).
2. *Halaqah* adalah model pembelajaran profetik dengan menggunakan pendekatan persuasif dalam mencapai tujuan pembelajaran.
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu partai politik berbasis Islam di Indonesia.

1. Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” dalam Evi Rine Hartuti, *et al., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Cet. I; Jogjakarta: Laksana, 2012), h. 19. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid.,* h. 12-13. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid.,* h. 18. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.,* h. 17. [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-6)
6. Agustinus Handoko, dan Marcus Suprihadi, “Survei PERC: Indonesia Terkorup di Asia Pasifik” (Online), [http://m.kompas.com/news/read/2012/02/22/15413395/survei.perc.indonesia.terko rup](http://m.kompas.com/news/read/2012/02/22/15413395/survei.perc.indonesia.terko%20rup) (diakses pada tanggal 27 Mei 2012) 2012. [↑](#footnote-ref-7)
7. Icha Rastika, dan Inggried, “45 Koruptor Kabur ke Luar Negeri”(Online), http://m.kompas. [com/news/read/2011/06/11/09414556/45.koruptor.kabur.ke](Http://m.kompas.com/news/read/2011/06/11/09414556/45.Koruptor.Kabur.Ke) (diakses pada tanggal 27 Mei 2012) 2011. [↑](#footnote-ref-8)
8. Wijayanto, dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 174. [↑](#footnote-ref-9)
9. “Survei: Hampir 50% Pelajar Setuju Tindakan Radikal”(Online), http://www.bbc.co.uk/ [indonesia/mobile/berita\_indonesia/2011/04/110426\_surveiradikalisme.sthml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/mobile/berita_indonesia/2011/04/110426_surveiradikalisme.sthml) (diakses pada tanggal 27 Mei 2012) 2011. [↑](#footnote-ref-10)
10. “Kekerasan di Sekolah Jangan Anggap Remeh”(Online), http://jurnalmetro.com/pen didikan/[1027-kekerasan-di-sekolah-jangan-anggap-remeh.html](http://jurnalmetro.com/pendidikan/1027-kekerasan-di-sekolah-jangan%20-%20anggap%20-%20remeh%20.%20html) (diakses pada tanggal 27 Mei 2012) 2012. [↑](#footnote-ref-11)
11. Jamal Ma`mur Asmani, *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah* (Cet. I; Jogjakarta: Diva Press, 2011), h. 24-25. [↑](#footnote-ref-12)
12. Zainal Aqib, dan Sujak, *Panduan dan Aplikasi Pendidikan Karakter* (Cet. I; Bandung: Yrama Widya, 2011), h. 6. [↑](#footnote-ref-13)
13. Asmani, *Buku ....,* h. 45. [↑](#footnote-ref-14)
14. Sukidi, *Kecerdasan Spiritual: Mengapa SQ Lebih Penting daripada IQ & EQ* (Cet. II; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004),h. 73. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ella Syafputri, “Peneliti: Pancasila diajarkan Tanpa Keteladanan”(Online), http:// m.antara news.com/berita/295962/peneliti-pancasila-diajarkan-tanpa-keteladanan (diakses pada tanggal 25 Juni 2012) 2012. [↑](#footnote-ref-16)
16. “Guru Honorer Bandung Minta Gaji.”(Online), [http://m.tibunnews.com/2012/10 /05/guru-honorer-bandung-minta-gaji](http://m.tibunnews.com/2012/10%20/05/guru-honorer-bandung-minta-gaji%20)  (diakses pada tanggal 27 November 2012) 2012. [↑](#footnote-ref-17)
17. “Peneliti Australia: Masyarakat Indonesia Tidak Percaya Lagi pada Polisi”(Online), http: [//forum.kompas.com/nasional/94161-peneliti-australia-masyarakat-indonesia-tidak-percaya-lagi-pada -polisi.html](http://forum.kompas.com/nasional/94161-peneliti-australia-masyarakat-indonesia-tidak-%20percaya%20-%20lagi-pada-polisi.html) (diakses pada tanggal 25 Juni 2012) 2012. [↑](#footnote-ref-18)
18. Desi Saputra, “Anarkisme Geng Motor karena Krisis Keteladanan”(Online), <http://m.antara>news.com/berita/307084/anarkisme-geng-motor-karena-krisis-keteladanan (diakses pada tanggal 25 Juni 2012) 2012. [↑](#footnote-ref-19)
19. Aqib, Sujak*, Panduan ....,* h. 3. [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid.,* h. 4. [↑](#footnote-ref-21)
21. Asmani, *Buku ....,* h. 9. [↑](#footnote-ref-22)
22. Hartuti, *Undang-Undang ….,* h. 15. [↑](#footnote-ref-23)
23. “Partai Demokrat Resmi Menjadi Partai Pemenang Pemilu 2009”(Online), http://www.ru [anghati.com/2009/05/09/partai-demokrat-resmi-menjadi-partai-pemenang-pemilu-2009/](http://www.ruanghati.com/2009/05/09/partai-demokrat-resmi-menjadi-partai-pemenang-pemilu-2009/) (diakses pada tanggal 28 Mei 2012) 2009. [↑](#footnote-ref-24)
24. M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 115. [↑](#footnote-ref-25)
25. Muhammad Syafii Antonio, *Muhammad SAW; The Super Leader, Super Manager* (Cet. IX; Jakarta: Pro LM Centre, 2007), h. 185. [↑](#footnote-ref-26)
26. Abudin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam pada Periode Klasiik dan Pertengahan* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 9. [↑](#footnote-ref-27)
27. Sukidi, *Kecerdasan ....,* h. 69. [↑](#footnote-ref-28)
28. Andi Mansyur, wawancara dengan penulis, 05 Oktober 2012. [↑](#footnote-ref-29)